

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Pematang Benteng Hilir berada di Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kondisi geografis desa ini merupakan dataran rendah dengan ekosistem rawa lebak. Bentang alam ini membentuk cara hidup warga yang sangat bergantung pada sektor pertanian padi dan perikanan air tawar. Pergantian musim kemarau dan penghujan menjadi penentu utama jadwal tanam dan siklus ikan, yang secara langsung berpengaruh pada pendapatan rumah tangga warga. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024, hlm. 45).

Secara demografis, penduduk desa ini didominasi oleh suku Banjar dengan ikatan kekeluargaan yang erat. Seluruh penduduknya memeluk agama Islam. Kehidupan warga sangat kental dengan tradisi pengajian rutin di Masjid dan Mushalla, yang menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan harta.

Ekonomi desa sangat bergantung pada sektor agraris. Siklus pendapatan petani yang musiman menyebabkan mereka membutuhkan modal besar saat periode tanam. Karena minimnya cadangan dana tunai, petani sering membutuhkan pinjaman modal. Seharusnya, skema pembiayaan syariah seperti *murabahah* atau *salam* bisa menjadi solusi bagi petani. Namun, warga justru lebih memilih pinjaman informal yang lebih praktis meskipun risikonya lebih tinggi dibandingkan prosedur

perbankan syariah yang dianggap rumit (Perangkat Desa Pematang Benteng Hilir, 2024).

Hambatan utama dalam akses perbankan formal adalah faktor lokasi. Kantor cabang bank syariah berada di pusat kota Amuntai dengan akses jalan yang kurang mendukung. Selain itu, minimnya fasilitas ATM dan kendala jaringan internet di desa membuat layanan perbankan digital syaria'ah sulit digunakan oleh warga yang mayoritas petani. Kondisi ini membentuk anggapan bahwa bank syariah adalah lembaga eksklusif untuk warga kota atau pegawai kantoran.

Selain jarak, ketiadaan kantor kas atau agen bank syariah di desa membuat warga tidak memiliki akses untuk berkonsultasi mengenai transaksi syariah. Kekosongan ini akhirnya diisi oleh rentenir yang menawarkan pinjaman praktis, meski mengandung unsur *garar* (ketidakpastian) dan eksploitasi. Masalah literasi keuangan di desa ini bukan sekadar soal pendidikan, melainkan akibat minimnya akses layanan keuangan dan kegagalan infrastruktur dalam menjangkau masyarakat pedesaan(Otoritas Jasa Keuangan, 2024, hlm. 21).

1. Data Informan

Penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Benteng Hilir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk melihat langsung bagaimana pemahaman masyarakat pedesaan terhadap keuangan syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan langsung terhadap kebiasaan ekonomi warga sehari-hari.

Meskipun mayoritas warga desa ini beragama Islam dan memiliki ikatan keagamaan yang sangat kuat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa nilai agama ini sering berbenturan dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, penelitian ini mewawancarai empat informan

utama yang mewakili berbagai latar belakang pekerjaan, pendidikan, dan status sosial di desa tersebut.

Tabel 4.1 Data Informan Penelitian

Nama Informan	Usia	Pekerjaan	Representasi Sosial	Gambaran Pemahaman Keuangan Syariah
Bapak Suhaimi	52 Tahun	Tokoh Agama	Tokoh Masyarakat	Sangat paham tentang riba dan sistem bagi hasil, serta sangat mendukung penggunaan bank syariah. Namun, ia mengeluhkan jauhnya jarak bank dari desa.
Bapak Yamani	35 Tahun	Sekretaris Desa	Perangkat Desa	Paham teori dasar bank syariah, tetapi lebih memilih menggunakan bank konvensional karena alasan kemudahan transaksi dan kebiasaan.
Ibu Misriati	37 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Masyarakat Awam	Sama sekali tidak paham tentang keuangan syariah. Ia hanya mengikuti kebiasaan keluarganya yang menggunakan bank konvensional.

Bapak Yudi	29 Tahun	Guru	Kaum Terdidik	Tahu tentang istilah bank syariah, tetapi sangat ragu dan menganggap cara kerja bank syariah sebenarnya "sama saja" dengan bank konvensional.
-------------------	----------	------	---------------	---

Sumber: Data diolah (2026)

2. Data Variabel

a. Literasi Keuangan Syariah dan Faktor yang Mempengaruhinya

Berdasarkan wawancara, pemahaman (literasi) warga Desa Pematang Benteng Hilir tentang keuangan syariah sangat beragam dan tidak merata. Perbedaan ini tidak hanya pada seberapa banyak istilah yang mereka hafal, tetapi juga pada keyakinan mereka terhadap sistem tersebut.

Di satu sisi, ada pemahaman yang sangat baik dari Bapak Suhaimi selaku tokoh agama. Ia mengerti bahwa keuangan syari'ah wajib menghindari riba (tambahan pada pinjaman), *garar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (perjudian/spekulasi). Ia juga hafal produk-produk bank syariah seperti tabungan dan pembiayaan bagi hasil. Menurutnya, bank syariah lebih adil karena membagi risiko untung dan rugi bersama nasabah, berbeda dengan bank konvensional yang mematok bunga tetap sejak awal.

Namun, pemahaman Bapak Suhaimi berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat awam seperti Ibu Misriati. Ibu Misriati sama sekali tidak tahu perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Pengetahuannya tentang larangan riba hanya sebatas kabar burung tanpa memahami alasan atau cara kerjanya. Karena tidak paham, ia mengambil jalan pintas dengan mengikuti

kebiasaan tetangga dan keluarganya yang sudah lama memakai bank konvensional. Baginya, yang paling penting adalah kebutuhan dapur sehari-hari bisa terpenuhi.

Di antara dua kondisi tersebut, terdapat Bapak Yudi dan Bapak Yamani. Bapak Yudi tahu istilah-istilah syariah, tetapi pengetahuannya justru membuatnya curiga. Ia merasa bank syari'ah pada akhirnya tetap membebankan biaya yang sama besarnya dengan bunga bank konvensional, sehingga ia enggan menggunakannya. Sementara itu, Bapak Yamani yang paham pentingnya menghindari riba justru tetap memilih bank konvensional karena alasan kepraktisan dan kecepatan layanan untuk urusan desa.

Kesenjangan pemahaman ini disebabkan oleh beberapa faktor penentu, baik dari dalam masyarakat maupun dari luar. Meskipun warga desa sangat religius dan rajin mengikuti majelis taklim, pengajian tersebut biasanya hanya membahas masalah ibadah harian seperti salat dan puasa. Jarang sekali ada forum yang membahas secara khusus tentang tata cara ekonomi Islam atau bahaya riba dalam pinjaman modal.

Dari pihak luar, perbankan syari'ah juga sangat jarang turun ke desa untuk memberikan edukasi. Jika pun ada, bahasa sosialisasi yang digunakan sering kali terlalu kaku dan memakai istilah bahasa Arab yang sulit dimengerti oleh warga awam. Kekosongan informasi ini akhirnya membuat warga lebih mudah dipengaruhi oleh kebiasaan lingkungan sekitarnya untuk terus menggunakan bank konvensional.

b. Persepsi, Pengalaman, dan Hambatan dalam Mengakses Keuangan

Syariah

Pengalaman warga desa dalam menggunakan keuangan syariah diwarnai oleh persepsi yang keliru serta hambatan fasilitas yang sangat nyata. Kedua hal ini menjadi dinding penghalang yang membuat warga kesulitan menjalankan niat keagamaannya dalam urusan uang.

Hambatan pertama adalah pandangan negatif warga yang menganggap bank syari'ah "sama saja" dengan bank konvensional. Pemikiran ini disuarakan secara jelas oleh Bapak Yudi. Ia merasa bahwa perubahan nama dari "bunga" menjadi "bagi hasil" tidak mengubah kenyataan bahwa nasabah tetap harus membayar cicilan bulanan yang nominalnya hampir sama. Karena pihak bank kurang terbuka dalam menjelaskan rincian keuntungan tersebut, warga yang kritis akhirnya menganggap label syariah hanyalah taktik pemasaran saja. Pandangan ini sangat merugikan karena membuat warga kehilangan minat dan kepercayaan terhadap perbankan Islam.

Hambatan kedua yang paling besar adalah jarak lokasi dan minimnya fasilitas fisik. Bapak Suhaimi dan Bapak Yamani sama-sama mengeluhkan jauhnya jarak dari desa menuju kantor cabang bank syariah terdekat yang berada di pusat kota Amuntai. Warga yang berprofesi sebagai petani atau pekerja harian harus mengorbankan waktu kerja mereka, mengeluarkan uang bensin, dan menempuh jalan yang rusak hanya untuk menabung atau menarik uang tunai. Ketiadaan mesin ATM syariah di desa atau kecamatan terdekat membuat warga merasa semakin kesulitan.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan agen bank konvensional dan rentenir keliling. Rentenir dan agen bank konvensional hadir langsung di warung-warung desa atau di depan pintu rumah warga, menawarkan pinjaman modal dengan syarat yang sangat mudah dan cepat. Pada akhirnya, hambatan jarak ini memaksa warga bahkan mereka yang sebenarnya berniat menghindari riba untuk menelan kekecewaan dan memilih layanan konvensional atau rentenir yang jauh lebih mudah dijangkau. Jarak fisik yang jauh secara perlahan menciptakan anggapan bahwa bank syariah hanyalah untuk orang-orang kota saja, bukan untuk masyarakat desa.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Literasi Keuangan dan Faktor Penentu Perilaku Masyarakat

Secara teori, masyarakat yang sangat taat beragama seharusnya lebih memilih bank syariah dan menolak bank konvensional yang mengandung unsur riba. Namun, temuan di Desa Pematang Benteng Hilir menunjukkan realitas yang berbeda. Kuatnya tradisi keagamaan di desa ini ternyata tidak otomatis membuat warganya paham dan menggunakan layanan perbankan syariah.

Untuk mengukur fenomena ini, kita dapat menggunakan standar literasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan matriks OJK, pemahaman warga desa terbagi menjadi empat kategori sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Temuan Lapangan

Klasifikasi Literasi OJK	Deskripsi Kemampuan	Representasi Informan	Penjelasan Temuan di Lapangan
Sangat Paham (Well Literate)	Paham fitur, manfaat, dan risiko produk, serta yakin menggunakannya.	Bapak Suhaimi (Tokoh Agama)	Menguasai teori larangan riba dan akad syariah, serta memiliki keyakinan penuh untuk mempraktikkannya secara disiplin.
Cukup Paham (Sufficient Literate)	Paham teori dasar, tapi belum yakin atau terampil menggunakannya.	Bapak Yamani (Sekretaris Desa)	Tahu bahwa bank syariah menghindari riba, namun tetap memilih bank konvensional karena alasan kemudahan dan kecepatan layanan.
Kurang Paham (Less Literate)	Tahu sebagian informasi, namun sama sekali tidak memiliki kepercayaan (skeptis).	Bapak Yudi (Guru)	Mengetahui istilah-istilah syariah, tetapi tidak yakin bahwa praktiknya benar-benar adil dan berbeda dari bank konvensional.
Tidak Paham (Not Literate)	Tidak punya pengetahuan dan keyakinan sama sekali terhadap produk keuangan.	Ibu Misriati (Ibu Rumah Tangga)	Sama sekali tidak mengerti perbedaan sistem keuangan dan hanya menabung mengikuti kebiasaan orang-orang di sekitarnya.

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil pemetaan berdasarkan standar OJK memperlihatkan betapa timpangnya pemahaman warga. Hal ini menjadi cermin rapuhnya edukasi keuangan di wilayah pedesaan Hulu Sungai Utara. Jika merujuk pada data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022, literasi keuangan syariah di Indonesia memang masih sangat memprihatinkan, yaitu hanya 9,14%, tertinggal jauh dari bank konvensional. Kondisi ketidakpahaman yang dialami oleh Ibu Misriati sangat sejalan dengan fakta nasional tersebut. Sebagai perempuan pedesaan, aksesnya terhadap informasi dan pendidikan keuangan sering kali dibatasi oleh struktur sosial dan budaya yang ada (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Pertanyaan pentingnya adalah: mengapa kegiatan agama yang sangat rutin di desa ini tidak mampu membuat warga seperti Ibu Misriati menjadi paham, atau meyakinkan keraguan warga terdidik seperti Bapak Yudi. Kegagalan ini bisa dibedah menggunakan dua teori sosiologi, yaitu teori keterikatan sosial (*embeddedness*) dari Karl Polanyi dan teori pilihan rasional dari James Coleman.

Menurut pandangan Polanyi, tindakan ekonomi pada dasarnya tidak terlepas dari keterlekatannya (*embeddedness*) pada struktur sosial dan agama. Idealnya, ketaatan beragama masyarakat Desa Pematang Benteng Hilir akan bermuara pada penolakan terhadap perbankan konvensional akibat adanya larangan riba. Namun, penetrasi sistem perbankan konvensional telah masuk terlalu dalam dan didukung oleh infrastruktur negara mulai dari penyaluran dana desa, kredit pertanian (KUR), hingga pembayaran gaji aparatur desa. Karena bank konvensional telah menyatu dengan urat nadi ekonomi desa, masyarakat dihadapkan pada dilema struktural.

Pada titik ini, sebagaimana dijelaskan oleh Coleman mengenai teori pilihan rasional (*rational choice*), nilai-nilai ideal agama sering kali terpaksa dikesampingkan karena individu akan menjatuhkan pilihan pada opsi yang paling efisien dan praktis untuk menjamin kelangsungan hidup serta kebutuhan ekonomi sehari-hari (Coleman, 1990; Polanyi, 1944).

Sementara itu, teori pilihan rasional dari James Coleman bisa menjelaskan tindakan Bapak Yamani dan Bapak Yudi. Teori ini menyatakan bahwa setiap orang selalu menghitung untung-rugi untuk mencari manfaat terbesar dengan pengorbanan sekecil mungkin. Bagi seorang aparat desa seperti Bapak Yamani, efisiensi waktu dan tenaga adalah segalanya. Karena jarak kantor bank syariah di kota Amuntai sangat jauh dan memakan biaya bensin serta waktu, maka secara hitungan rasional Bapak Yamani lebih memilih bank konvensional. Fasilitas mesin ATM dan agen bank konvensional jauh lebih mudah ditemukan di setiap sudut kecamatan.

Lebih jauh lagi, bagi Bapak Yudi, perhitungan rasionalnya justru membongkar kelemahan sistem syariah itu sendiri. Berbekal pengetahuannya, ia menghitung rincian kontrak pembiayaan syariah dan membandingkannya dengan bank konvensional. Hasilnya, ia merasa nilai cicilannya sama sekali tidak memberikan keuntungan finansial yang berbeda. Ketika ia menyimpulkan bahwa keduanya "sama saja", ia sebenarnya sedang menyoroti sebuah fenomena di mana bank syariah mulai meniru prosedur dan cara kerja bank konvensional demi bisa bersaing di pasar modern. Karena bank syariah dianggap mulai kehilangan jati diri sosialnya, warga merasa tidak ada untungnya bersusah payah beralih ke bank

syariah jika beban biaya yang harus mereka keluarkan ternyata tetap sama (Pitaloka, 2021).

Masalah ini semakin parah karena cara bank syariah berkomunikasi sangat tidak sesuai dengan kondisi warga desa. Sosialisasi yang dilakukan sering kali menggunakan istilah bahasa Arab yang kaku dan rumit, seperti *'iwad* (penyeimbang), *qard* (pinjaman), atau *ujrah* (upah). Bagi petani Banjar di pedesaan, istilah-istilah ini justru membuat mereka bingung dan merasa asing. Warga sesungguhnya lebih membutuhkan penjelasan yang sederhana, membumi, dan transparan, bukan sekadar hafalan istilah agama. Ketika teori ideal dari kitab suci tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa keseharian warga, secara wajar mereka akan kembali memilih bank konvensional yang aturannya sudah jelas dan sangat praktis.

Kondisi ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ketaatan beragama saja tidak cukup untuk menciptakan pemahaman keuangan syariah yang utuh. Tanpa adanya kantor fisik yang dekat, transparansi keuntungan yang jujur, dan cara mengedukasi yang pas dengan budaya lokal, nilai-nilai keagamaan di desa hanya akan membeku menjadi rutinitas ibadah di dalam masjid yang tidak berdaya menghadapi jebakan ekonomi modern.

2. Analisis Hambatan Akses Keuangan dalam Perspektif Perlindungan Harta (*Maqāṣid al-syarī'ah*)

Dalam hukum Islam, aturan diturunkan bukan untuk menyusahkan, melainkan untuk membawa kebaikan melalui prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Salah satu pilar utamanya adalah *ḥifẓ al-māl*, (perlindungan harta). Melindungi harta di sini bukan sekadar anjuran untuk menabung, melainkan kewajiban sistem untuk

melindungi masyarakat kecil dari penipuan, pemerasan, dan praktik riba (Shidiq, 2009). Idealnya, bank syariah harus hadir sebagai pelindung warga dari eksploitasi ekonomi.

Namun, kenyataan di Desa Pematang Benteng Hilir sangat jauh dari nilai ideal tersebut. Secara ekonomi, kehidupan petani di Hulu Sungai Utara sangat rentan. Pendapatan mereka tidak menentu karena sangat bergantung pada cuaca, panen, dan harga pasar. Ketika terjadi kondisi darurat seperti gagal panen, anak harus segera membayar uang sekolah, atau keluarga jatuh sakit mereka butuh uang tunai dengan cepat untuk menyambung hidup.

Di saat-saat krisis inilah, lembaga keuangan syariah justru tidak hadir di desa. Warga akhirnya terjebak dalam dilema yang berat: di satu sisi mereka ingin taat agama dengan menghindari riba seperti yang selalu diajarkan oleh Bapak Suhaimi, tapi di sisi lain keluarga bisa kelaparan jika tidak segera berutang. Pada akhirnya, demi bertahan hidup, warga terpaksa mencari pinjaman ke bank konvensional atau jatuh ke tangan rentenir.

Rentenir sangat jeli melihat kepanikan warga. Mereka menawarkan pinjaman tunai dalam hitungan jam, tanpa jaminan sertifikat yang rumit, dan uang cicilannya dijemput langsung ke rumah. Walaupun warga sadar bahwa bunga majemuk dari rentenir itu sangat mencekik dan berdosa, kondisi darurat membuat mereka tidak punya keberanian untuk menolak (Siregar, 2024).

Pada titik ini, cita-cita *hifz al-māl* (perlindungan harta) benar-benar hancur. Harta warga desa justru terus terkuras untuk membayar bunga yang berlipat ganda. Kondisi ini menjadi kritik tajam bagi industri perbankan syariah. Sebagaimana

dikritik oleh Asutay (2012), perbankan syariah modern sering kali mengalami "kegagalan sosial" (*social failure*) karena lebih sibuk mengekspansi infrastruktur komersial di kawasan perkotaan dan memprioritaskan nasabah berekonomi menengah ke atas. Mereka cenderung mengabaikan masyarakat kecil di pedesaan karena alasan rasionalitas bisnis—dianggap berisiko tinggi terhadap gagal bayar (NPL/NPF) dan membutuhkan biaya operasional yang besar untuk menjangkau pelosok. Sikap pragmatis institusi keuangan ini seolah mengkhianati visi utama ekonomi Islam yang digariskan oleh Chapra (2008), di mana pilar fundamental *maqāsid al-syariah* seharusnya diarahkan pada pemerataan kesejahteraan dan pembebasan masyarakat miskin dari jerat eksploitasi ekonomi.

Sikap ragu dari Bapak Yudi bahwa bank syariah "sama saja" dengan bank konvensional sebenarnya sangat beralasan. Karena bank syariah gagal memberikan solusi pinjaman yang ramah dan mudah dijangkau bagi petani, kehadirannya di Indonesia dianggap belum memberikan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat bawah. Warga seperti Ibu Misriati akhirnya menjadi korban ganda: sudah miskin secara finansial, miskin pula akan informasi keuangan. Ketiadaan lembaga seperti koperasi syariah (BMT) di desa membuktikan bahwa gerakan ekonomi Islam saat ini masih sangat elitis.

Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan yang dilakukan harus diubah total. Meningkatkan literasi tidak akan berhasil jika tokoh agama hanya menakut-nakuti warga tentang ancaman neraka akibat riba, tanpa memberikan institusi keuangan pengganti yang nyata. Pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tokoh agama, dan pihak bank harus berani turun ke lapangan.

Pemanfaatan teknologi keuangan digital (fintech) syariah atau menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai agen perpanjangan tangan bank syariah adalah solusi nyata yang harus segera diterapkan. Jika hal ini terus dibiarkan, maka tingginya literasi keuangan syariah di pedesaan hanya akan menjadi angan-angan, dan rentenir akan terus merampas kesejahteraan serta ketenangan hidup masyarakat desa (Arum & Andrini, 2023).